

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM: MUTU DAN RELEVANSI

Alhamuddin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI Univ. Islam Bandung
E-mail: alhamuddinpalembang@gmail.com

Abstract: World Bank Report (2013) mentioned that the higher education system is currently lacking to respond to the dynamics of the job market thus causing a mismatch of skills are n eeds to be improved. Based on these results, universities need to increase understanding about the curriculum and parse the skills mismatch. Specifically, the comprehensive conduct the mapping related to demand and supply of skills in different sectors and the needs of society. Such mapping exercises will only be useful if the pattern of gathering information on the need for improved and involve all stakeholders who have a requirement to graduate of higher education itself.

Keywords: *Higher Education, Curriculum, Relevant, Quality*

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan tulang punggung penggerak daya saing bangsa.¹ Untuk itu, kinerja perguruan tinggi (PT) dalam menyelenggarakan pendidikan menjadi salah satu katalisator tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sering dinyatakan sebagai tingkat perkembangan SDM atau *Human Development Index* (HDI). Secara kuantitas, pendidikan tinggi di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh lebih dari 4252 PT, yang meliputi Universitas (538), Institut (128), Sekolah Tinggi (2240), Politehnik (241), Akademi (1105).² Secara keseluruhan, PT tersebut menampung 4.987.740³ mahasiswa, suatu jumlah yang sangat pantastis. Namun secara kualitas, PT kita dipandang belum memiliki kemampuan daya saing yang memadai.⁴

Data *Knowledge Economic Index* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Misalnya,

¹ A. Chaedar Alwasilah, dkk. (2008). *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusi*. Jakarta. Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 7.

² Tersedia di: <http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruan tinggi/homegraphpt>. diakses 28 April 2016.

³ Tersedia di: <http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphjk>. diakses 28 April 2016.

⁴ Chan Basaruddin, dkk. (2008). *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusi*. Jakarta. Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 171.

Indonesia menempati peringkat 91 (dari 137 Negara) dan termasuk berada pada kelompok Negara yang tidak memperlihatkan kemajuan sejak tahun 1995. Sementara itu, data yang dikeluarkan *Global Economic Forum*, Indonesia menempati urutan 54 dari 131 negara.⁵ Selain itu, Alhamuddin⁶ menyebutkan bahwa secara kuantitas, lulusan PT sudah cukup besar, secara kualitas kondisinya masih jauh dari memuaskan. Mutu lulusan masih dianggap belum memnuhi harapan masyarakat. Keluhan seperti ini meliputi berbagai hal, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai profesionalitas mereka dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya masih banyak lulusan yang belum / tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pada akhirnya banyak diantara mereka yang masih menganggur.

Dalam perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi maikannusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat.

Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy (KBE)*, yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – *education for the knowledge economy (EKE)*. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Ketersediaan manusia bermutu yang menguasai Iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat

⁵ World Bank East Asia and Pacific Regional Report. (2009). *Putting Higher Education to Work. Skills and Research for Growth in East Asia*. Washington D.C.: World Bank.

⁶ Alhamuddin. (2015). Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global. *Jurnal Vokasional*. 1 (1), Hal. 9-18.

mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.⁷

Data statistik, Badan Statistik Negara RI⁸ tentang angka pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan mulai tahun 2013, sampai dengan 2015, menunjukkan bahwa angka pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi, yaitu universitas mengalami kenaikan setiap tahunnya, selanjutnya, dapat ditunjukkan pada tabel I berikut ini

Tabel 1.
Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Sumber: Badan Statistik Negara RI Tahun 2013-2015

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹	2014 ²		2015	
		Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	SD ke Bawah	53,81	55,31	53,96	54,61	50,83
2	Sekolah Menengah Pertama	20,56	21,06	20,35	21,47	20,70
3	Sekolah Menengah Atas	17,88	18,91	18,58	19,81	19,81
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,97	10,91	10,52	11,80	10,80
5	Diploma I/II/III	2,93	3,13	2,96	3,14	3,08
6	Universitas	7,61	8,85	8,26	10,02	9,56
Jumlah		112,76	118,17	114,63	120,85	114,82

Catatan:

1. Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk
2. Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa relevansi pendidikan tinggi belum responsif terhadap perubahan yang ada. Dalam hal ini, kurang berhasilnya LPTK dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan selama ini menghasilkan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi disebabkan sedikitnya lima masalah; *pertama*, beban kurikulum yang terlalu berat; *kedua*, beban perkuliahan yang terlalu berat; *ketiga*, sempit dan terbatasnya kesempatan untuk mendalami berbagai bahan perkuliahan tersebut; *keempat*, sedikitnya pilihan atas subjek-subjek yang betul-betul esensial untuk dipelajari peserta didik dan terbatasnya metode dan cara-cara

⁷ Ace Suryadi, Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), Hal. 17

⁸ (online) tersedia: <https://www.bps.go.id/>. Diakses 13 Desember 2015.

mempelajarinya; *kelima*, sistem penilaian (*assesment*) dan evaluasi yang cenderung menilai dan mengukur hafalan dan verbalismen belaka.⁹ Akibat kelima hal ini, mahasiswa umumnya dan lulusan LPTK khususnya kehilangan imajinasi dan kreativitas intelektualnya. Dampaknya, kompetensi lulusan PTAI masih dianggap sebagai sumber kedua dibandingkan dengan lulusan yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi umum yang ada.

Hal senada diungkapkan oleh Furchan, dkk¹⁰ bahwa kelemahan kurikulum PTAI disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat: banyak prodi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; (2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan; (3) kurang efisien, yakni banyaknya matakuliah dan sks tidak menjamin dihasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan; (4) kurang fleksibel, yakni PTAI kurang berani secara kreatif dan bertanggungjawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (setempat, nasional atau global); (5) readability rendah, tidak komunikatif (bias banyak menimbulkan multi tafsir); (6) hanya berupa deretan matakuliah; (7) berbasis (berfokus) pada matakuliah / penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler / hasil belajar / mutu lulusan; (8) hubungan fungsional antar matakuliah yang mengacu pada kurikuler kurang jelas.

Dengan demikian, Azra¹¹ menyatakan bahwa kurikulum dan PBM yang diselenggarakan hendaknya ditinjau kembali. Dan difokuskan pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, *pertama*, kompetensi keilmuan yang mencakup kecerdasan intelektual, sehingga ia mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan secara benar dan baik; *kedua*, kompetensi profesional agar ia mampu menyelenggarakan PBM yang efektif; *ketiga*, kompetensi personal yang mencakup kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Hal tersebut berguna agar ia dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya; *keempat*, kompetensi sosial yang mencakup kecerdasan sosial. Sehingga ia mampu memahami dinamika sosial dan lingkungannya, serta dapat memberikan respon yang memadai dan tepat.

⁹ Azyumardi Azra. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas. Hal. 53.

¹⁰ Arief Furchan, Muhaimin, & Agus Maimun. (2009). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 33.

¹¹ Azyumardi Azra. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rekonstruksi dan Demokratisasi*. hal. 52-53.

Peran Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dampak globalisasi bersifat multidimensional; hal ini juga terasa dalam bidang pendidikan terutama pendidikan tinggi yang secara langsung berinteraksi dengan komunitas internasional. Secara spesifik, globalisasi mendorong terjadinya perubahan peran institusi pendidikan tinggi. Peran sebagai institusi pembelajaran tradisional tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah menjadi institusi pencipta pengetahuan. Sementara itu, perencanaan yang dibuat secara acak (*by accident*) harus diubah menjadi perencanaan strategis (*by design*). Ditinjau dari sudut tantangan maka pendekatan komparatif harus diubah menjadi pendekatan kompetitif.¹²

Kurikulum dalam pengertian yang sempit adalah bagian dari keseluruhan aspek dalam sebuah proses belajar mengajar yang tertuang secara tertulis dan dipergunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh sebuah lembaga. Kurikulum dalam arti luas menyangkut seluruh aspek dalam sebuah proses belajar mengajar yang terjadi dalam upaya pendidikan dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebagai metode, cara, atau sistem pembelajaran yang diterapkan pada lembaga pendidikan, termasuk materi atau mata pelajaran yang diajarkan dan tempat pelaksanaan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum memang merupakan sesuatu yang kompleks, karena tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan secara teknis pengembangan berbagai komponen kurikulum dari para pengembang kurikulum, akan tetapi lebih dari itu para pengembang kurikulum harus mampu mengantisipasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum bersifat internal maupun eksternal.

Adapun proses pengembangan kurikulum adalah kegiatan menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum atas dasar penilaian yang dilakukan selama kegiatan

¹² Harsono, 2005. Yohannes HC. *Kurikulum Terpadu*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Aditya Media Yogyakarta, Hal. 23

pelaksanaan kurikulum, dan hal tersebut bisa dikatakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan kurikulum mempunyai tujuan untuk perbaikan.

Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum makin berkembang, termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana di sekolah atau institusi pendidikan. Pondasi kurikulum meliputi kemasana tata nilai (*values*) dan kepercayaan (*beliefs*) tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan bagaimana caranya peserta didik dapat memperoleh dan/atau menguasai pengetahuan tadi. Di samping itu, kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik.¹³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada Bab X pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 36 ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (pasal 36 ayat 2). Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dengan prinsip diversifikasi adalah suatu pengembangan yang memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.¹⁴

Kurikulum memiliki makna yang beragam, ada yang mengatakan bahwa “kurikulum adalah “seperangkat mata pelajaran”¹⁵, “kurikulum sebagai “pengalaman belajar”¹⁶, ada juga yang menyatakan kurikulum sebagai “rencana atau program

¹³ Prideaux D. 2003. *ABC Of Learning And Teaching In Medicine: Curriculum Design*. BMJ. Hal. 326

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵ Pengertian ini ditemukan dari definisi yang dikemukakan oleh Robert M. Huntchins (1936) yang menyatakan “*The curriculum should include grammar, reading, rhetoric and logic, and mathematics, and addition at the secondary level introduce the great books of the western world*”

¹⁶ Caswel & Campbel (1935) menyatakan “... *all of the experiences children have under the guidance of teacher*” Rommine (1945) “*curriculum is interpreted to mean of all organized courses, activities, and experience which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not*” dan berbagai tokoh lainnya.

pembelajaran”.¹⁷ Dalam konteks Undang-Undang No.20 tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁸

Berdasarkan beberapa konsep kurikulum tersebut, maka dalam artikel ini kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang telah disusun.

Peranan pengembangan kurikulum menyangkut peranan konservatif, kreatif, kritis dan evaluatif.¹⁹ Kurikulum mempunyai peranan sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasikan kebudayaan suatu bangsa. Tanpa kurikulum yang baik kebudayaan suatu bangsa bisa dalam sekejap ditelan bumi karena tidak ada institusi yang berusaha untuk melestarikannya. Dengan mencantumkan dalam kurikulum kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek moyangnya, inilah yang dimaksud dengan peran konservatif.

Selain peranan konservatif, kurikulum juga dapat berperan kreatif, kritis dan evaluatif. Peran kreatif artinya bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi mutakhir yang ada. Pengembang kurikulum tidak boleh diam dan puas dengan apa yang sudah dicapai, namun harus senantiasa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Sehingga kurikulum yang ada dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, kurikulum harus mampu menciptakan kreasi- kreasi baru dalam kaitannya, misalnya, dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat

¹⁷Hilda Taba (1962) “A curriculum is a plan for learning, therefore , what is known the learning process and the development of the individual has being on the shaping of a curriculum”

¹⁸Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁹ Wina Sanjaya. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran. Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 10-11.

sehingga kebudayaan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakatnya.

Peran kritis dan evaluasi yaitu bahwa kurikulum dapat dengan kritis menilai dan mengevaluasi keberadaan kebudayaan nenek moyangnya untuk mengetahui dengan jeli nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Apabila dipandang ada unsur-unsur kebudayaan yang kurang baik, misalnya, generasi berikutnya dapat memilah-milah mana kebudayaan yang dapat diterapkan dan mana yang kurang sesuai untuk diterapkan pada jamannya.

Kurikulum harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki mentalitas baru yang religius, produktif, hemat, memiliki rasa kebangsaan tinggi, mengenal lingkungan, gemar membaca, gemar berolahraga, cinta seni, inovatif, kreatif, kritis, demokratis, cinta damai, cinta kebersihan, disiplin, kerja keras, menghargai masa lalu, menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan sebagainya. Inilah SDM Indonesia yang ideal. Dengan kata lain, kurikulum harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kualitas kemanusiaan yang seharusnya terkait dengan pengembangan ilmu dan dunia kerja.

Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam

Substansi Pendidikan pada dasarnya adalah refleksi atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar mahasiswa berbentuk kegiatan-kegiatan belajar yang mengutamakan kerjasama berbagai pihak dalam mengapresiasi kepekaan terhadap persoalan kekinian. Berdasar hal tersebut maka dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari problem yang dihadapi dimasyarakat sebagai isi pendidikan, sedangkan proses atau pengalaman belajar mahasiswa adalah dengan cara memerangkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, berupaya mencari pemecahan terhadap problem tersebut menuju masyarakat yang lebih baik.²⁰ Pembinaan tersebut dilakukan secara periodik dan berkesinambungan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan dan tuntutan zaman yang tidak pasti. Pengelolaan atau manajemen yang

²⁰ Arief Furchan, Muhaimin, & Agus Maimun. (2009). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 28.

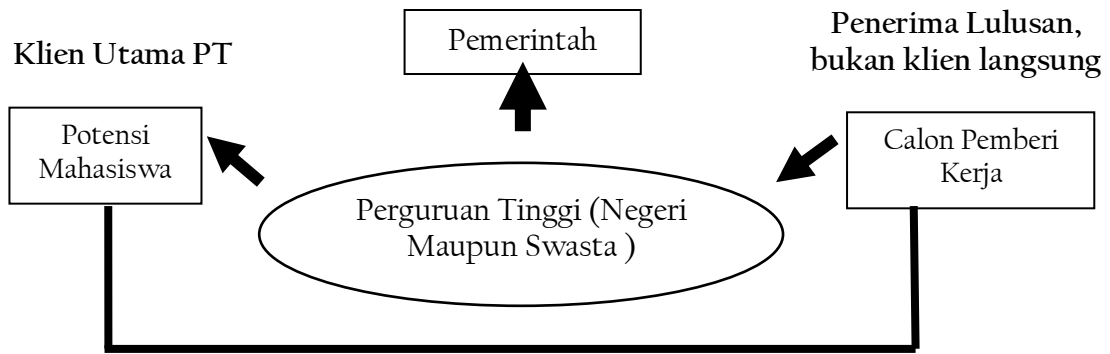
baik akan berdampak positif terhadap inovasi yang dilakukan,

Kurikulum PT akan memberikan dampak yang sangat positif apabila penyusunannya benar-benar didasarkan pada kajian yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang berasal dari PT itu sendiri, orang tua, masyarakat, para ahli, mahasiswa dan lingkungannya. Dari dalam PT /sekolah yang perlu dikaji adalah keberadaan sumberdaya manusia yang dimiliki, mahasiswa, serta fasilitas pendukung yang dimiliki. Dari sisi orang tua adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan keinginan serta kebutuhannya. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar, serta kondisi geografi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari sebuah kajian yang komprehensif tersebut akan muncul suatu pengetahuan tentang isu-isu strategis yang sedang berkembang dan tuntutan yang dibutuhkan oleh calon lulusan.

Karl Manheim (dalam Fadjar)²¹, mengemukakan bahwa untuk memahami pendidikan perlu diperhatikan siapa mendidik siapa?, di masyarakat apa?, bilamana dan dimana serta untuk posisi sosial apa peserta didik itu dididik?. Beberapa pertanyaan mendasar tersebut menjadi kerangka dasar dalam merencanakan suatu kurikulum pendidikan agar fungsi dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Perlu dipahami bahwa kerangka dasar tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berkoneksi antara satu dengan yang lain. Sehingga hubungan antara koneksi harus dijaga agar tercipta relevansi. Alhamuddin²² menyebutkan bahwa proses penyusunan tersebut dilakukan dengan pendekatan sistemik (*systemic approach*), proses pencapaian hasil secara efektif dan efisien atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada. Proses tersebut meliputi: pengidentifikasian kebutuhan dan masalah, alternative pemecahan masalah. Adapun karakteristik pendekatan ini adalah memiliki tujuan, fungsi, komponen, interaksi dan efek sinergik yang dipengaruhi oleh sistem lain, mengalami proses transformasi, umpan balik dan sifat relatif.

²¹ A.M.Fadjar. (2009). *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UMM Press. Hal. 15.

²² Alhamuddin. (2012). Pengembangan Kurikulum Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Upaya Mencetak Guru Agama Profesional (Sebuah Analisis Deskriptif dalam Konteks UUGD). *Jurnal Al-Furqan: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. 1 (1), Hal. 29.



1. Informasi
 - a. Peluang Pasar Tenaga Kerja
 - b. Mutu Lembaga (Penjaminan Mutu).
2. Intensif
 - a. Pendanaan dan Tata Kelola
 - b. Otonomi dan Akuntabilitas.

Gambar 1 : Kerangka Akuntabilitas PT
(Sumber : World Bank, 2013:4)

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan logika berpikir dalam kerangka sederhana. Dalam kerangka ini, PT berada di tengah-tengah dengan klien yang terdiri dari mahasiswa dan calon mahasiswa. Hubungan dengan pemberi kerja bersifat tidak langsung ; PT hanya merespon dengan menyesuaikan tuntutan calon mahasiswa dan peraturan serta insentif sesuai dengan tata kelola kelembagaan dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Kesesuaian antara tuntutan pasar tenaga kerja dan tuntutan mahasiswa terhadap PT bergantung pada sistem, bukan hanya pada satu kebijakan saja. Kendati kebijakan dalam sistem bias berbeda-beda, dua elemen penting harus ada : (1) memberikan informasi mengenai tren pasar tenaga kerja dan kualitas PT dan (2) memberikan insentif yang tepat, yang memerlukan otonomi dan akuntabilitas, insentif untuk kinerja dan kesempatan untuk PT berhubungan langsung dengan pemberi kerja.²³

Bertalian dengan mutu dan relevansi kurikulum PT, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012²⁴ tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

²³ World Bank. (2013). *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif terhadap Pasar Kerja?*. Jakarta; The World Bank. Hal. 4.

²⁴ Presiden Republik Indonesia (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No.08 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indonesia (KKNi) mengharuskan kurikulum PT disusun sesuai dengan kerangka yang termaktub dalam KKNi tersebut. KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²⁵

KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa KKNi merupakan sebuah sarana yang memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dengan mudah dapat melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di belahan dunia. Selain itu, melalui penerapan KKNi hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Melalui fungsi yang komprehensif tersebut, menjadikan KKNi berpengaruh pada setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada aspek kurikulum.²⁶

Selain itu, dalam KKNi dinyatakan Sembilan kualifikasi SDM Indonesia yang produktif yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi pendidikan dan pelatihan yaitu kebutuhan kompetensi kerja (*job competency*) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan.²⁷

Deskriptor setiap jenjang kualifikasi yang merupakan paduan antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum dan aspek lain yang terkait serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa

Republik Indonesia.

²⁵ Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 11.

²⁶ Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Hal. 11.

²⁷ Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi*. Jakarta Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. .

yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sebagai catatan, mengutip pendapat Furqan²⁸ “kurikulum itu bagaikan jasa layanan yang dijual pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan membeli kurikulum itu, maka kurikulum harus dikemas sedemikian rupa agar masyarakat yakin bahwa mereka tidak akan merugi belajar di lembaga pendidikan tersebut”.

Jewett dan Bain (dalam Furchan)²⁹, berpendapat bahwa secara ideal, setiap PTAI harus menciptakan sendiri model kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Model kurikulum adalah desain untuk mengembangkan kurikulum bagi setting pendidikan yang khusus sesuai dengan kapasitas lembaga.

Kebijakan di atas mengandung makna bahwa kurikulum perlu dikembangkan dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi; lebih mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumberdaya pendidikan yang tersedia; memberikan kebebasan yang luas kepada pelaksana pendidikan di PTAI untuk mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan; menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan. Untuk itu, PTAI harus mampu melakukan inovasi reformulasi, bahkan rekonstruksi kurikulum yang diasumsikan kurang relevan dengan kondisi kekinian. Kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk penyatuan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan semua pihak untuk menjadikan PTAI sebagai lembaga pendidikan alternatif. Dengan demikian, relevansi kurikulum PTAI harus senantiasa dikembangkan secara kontiyu (*continuous quality improvement*) agar mutu dari kurikulum tersebut tetap terjaga dan dapat bernilai daya saing terhadap lulusan PT itu sendiri.

Berbagai kendala yang sekiranya dapat menghambat proses pengembangan harus ditanggapi secara positif dan sekaligus ditransformasi menjadi tantangan untuk dicarikan solusinya. Ketetapan tentang perlunya pengembangan kurikulum harus tercantum secara eksplisit di dalam rencana strategis institusi yang kemudian dijabarkan dalam rencana operasional tahunan. Suatu program pengembangan

²⁸ Furqan, A. (2007). *Anatomi Problem Kurikulum di PTAI*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia

²⁹ Arief Furchan, Muhaimin, & Agus Maimun. (2009). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 73.

kurikulum memerlukan dukungan dana yang cukup, mulai dari awal program pengembangan sampai dengan evaluasi kurikulum baru yang akan dilaksanakan oleh institusi pendidikan. Dengan demikian penyusun kurikulum harus memahami makna siklus *continuous improvement*, agar segmen dana dapat diprakirakan dan direncanakan secara rasional. *Monitoring & evaluation* merupakan aktivitas yang memerlukan kesungguhan, kesabaran, ketekunan, kejujuran dan fleksibilitas tanpa kehilangan ketegasan sikap. Kegiatan ini merupakan kunci *continuous improvement*.

Catatan Akhir

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, penulis menggaris bawahi bahwa perlu adanya *framework of thinking* (kerangka pikir) yang jelas dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi agama Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas; baik lulusan maupun perguruan tinggi itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pengembangan kurikulum bukan sekedar melakukan inovasi dan perubahan sejumlah mata kuliah, jumlah SKS atau lainnya, tetapi yang lebih penting adalah harus diikuti dengan perubahan-perubahan dalam *actual curriculum* di dalam proses pembelajaran.

Pengembangan maupun penyusunan kurikulum pada perguruan tinggi (PT) merupakan usaha yang berlangsung secara terus menerus dalam perioda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing PT. Perkembangan pendidikan yang sangat cepat tidak menutup kemungkinan beberapa aspek dari paradigma pendidikan telah turut berkembang. Dengan demikian perlu kesadaran akademis bahwa bagian-bagian teknis tertentu dari proses pengembangan dan penyusunan kurikulum PT secara berkala disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Perkembangan dari unsur-unsur penyusun kurikulum tentunya tidak dapat dan semestinya tidak perlu dihindari. Perkembangan tersebut justru harus dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian secara terus menerus pada perkembangan terkini akan memberikan jaminan proses pendidikan serba cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa depan.

Daftar Rujukan

- Alhamuddin. (2012). Pengembangan Kurikulum Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Upaya Mencetak Guru Agama Profesional (Sebuah Analisis Deskriptif dalam Konteks UUGD). *Jurnal Al-Furqan: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. 1 (1)
- _____. (2015). Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global. *Jurnal Vokasional*. 1 (1)
- Alwasilah, A.C. dkk. (2008). *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusi*. Jakarta. Kedepatian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Azra, Azyumardi. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Basaruddin, Chan, dkk. (2008). *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusi*. Jakarta. Kedepatian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 171.
- Fadjar, A. M. (2009). *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*. Malang. UMM Press.
- Furchan, Arief., Muhaimin, & Maimun, Agus. (2009). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Furqan, A. (2007). *Anatomi Problem Kurikulum di PTAI*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Harsono. (2005). Yohannes HC. *Kurikulum Terpadu*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Aditya Media Yogyakarta
- <http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>, diakses 28 April 2016
- Presiden Republik Indonesia (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No.08 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Prideaux D. (2003). *ABC of Learning And Teaching In Medicine: Curriculum Design*. BMJ
- Sanjaya, Wina. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran. Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 9KTSP*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suryadi, Ace. 1999. *Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka

Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 , Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

World Bank. (2013). *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif terhadap Pasar Kerja?*. Jakarta; The World Bank.